

**Strategi Pemerintah Kota Sawahlunto Periode 2008-2013
Untuk Mewujudkan Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

Oleh:

ANDRIHAN

06 193 076



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

ABSTRAK

Andrihan, 06 193 076, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Pembimbing I Drs. Tamrin, Msi, Pembimbing II Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA. Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Kota Sawahlunto Periode 2008-2013 Untuk Mewujudkan Kota Wisata Tambang Berbudaya.

Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang sedang melakukan pembangunan dan pengembangan pariwisata. Kota Sawahlunto sendiri sejak dahulu telah dikenal sebagai kota tambang batubara, tetapi seiring berjalannya waktu, deposit batubara pun mulai menipis dan pemerintah Kota Sawahlunto memilih opsi wisata tambang sebagai visi kota dan mencoba menjadikan Sawahlunto sebagai kota wisata yang dahulunya kota tambang. Berdasarkan realitas dan kenyataan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan strategi Pemerintah Kota Sawahlunto Periode 2008-2013 Untuk Mewujudkan Kota Wisata Tambang Berbudaya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep strategi menurut Richard Vancil, dengan melihat komponen dalam menjalankan strategi agar tercapai tujuan itu sendiri antara lain: Sasaran jangka panjang, kebijaksanaan dan kendala, serta seperangkat rencana yang sedang berjalan mengenai tujuan jangka pendek.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan di Kota Sawahlunto khususnya di Kantor Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sedangkan analisis data dilakukan secara *etik* dan *emik*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: strategi pemerintah Kota Sawahlunto dilihat dari teori Richard Vancil tentang strategi antara lain: Sasaran jangka panjang; strategi yang dibuat untuk mewujudkan kota wisata tambang yang berbudaya telah di implementasikan dan menghasilkan peningkatan yang cukup baik serta telah banyak dana yang dialokasikan untuk mencapai sasaran jangka panjang tersebut. Kebijakan dan kendala; kebijaksanaan pemerintah Kota Sawahlunto, antara lain menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan kota lama dengan merenovasi dan merevitalisasi bangunan tua dikawasan kota lama, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Walikota. Sedangkan kendala saat ini adalah: akses jalan dikategorikan kecil, kurangnya minat investor, masih menggunakan dana APBD, dan masih banyak terdapat pemikiran yang tidak sejalan antara masyarakat dan pemerintah dalam pemahaman konsep pariwisata. Seperangkat rencana jangka pendek; pemerintah Kota Sawahlunto juga mengembangkan objek wisata rekreasi yang bertujuan untuk menarik jumlah pengunjung.

Kata Kunci : Kota Wisata, Strategi, Kebijakan, Kendala, Inovasi dan Terobosan Baru.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah salah satu upaya bangsa Indonesia untuk menciptakan suatu perubahan. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di bidang pemerintahan. Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dalam sistem pemerintahan desentralisasi sendiri, Pemerintahan daerah telah diberi kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.

Pelaksanaan otonomi daerah secara formal telah dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah sendiri menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah otonom diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Daerah otonom memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan

¹ Lebih lanjut lihat Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7.

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah sendiri perlu adanya prinsip yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.²

Dengan adanya otonomi daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah dalam mengatur segala urusan yang ada didaerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang paling menonjol saat ini adalah perencanaan pembangunan daerah seperti yang di tulis dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.³ Dengan otonomi daerah sendiri diharapkan pemerintah daerah otonom mampu menjalankan pembangunan dengan efektif dan efisien, karena dengan otonomi daerah pemerintah daerah otonom lebih mengetahui apa saja yang dibutuhkan daerahnya dan apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pembanguana daerahnya sendiri. Dengan melakukan

² *Ibid*.

³ Lebih lanjut lihat *Undang-undang* No 32 tahun 2004 BAB VII Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 150 ayat (1).

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Dalam pencapaian kota wisata tambang yang berbudaya ini pemerintah Kota Sawahlunto giat melakukan pembangunan dan pengembangan segala potensi wisata yang terdapat di Kota Sawahlunto, Berdasarkan informasi dan pengamatan yang dilakukan, strategi pemerintah Kota Sawahlunto dengan landasan teori Richard Vancil yang mengemukakan beberapa komponen dalam menjalankan strategi agar tercapai tujuan itu sendiri antara lain:

1. Sasaran jangka panjang; dalam hal ini, strategi yang dibuat untuk mewujudkan kota wisata tambang yang berbudaya sendiri telah di implementasikan secara nyata dan sudah berjalan serta menghasilkan peningkatan yang cukup baik dan telah banyak dana yang dialokasikan untuk mencapai sasaran jangka panjang sebagai kota wisata tambang yang berbudaya. Kekhawatiran terhadap isu Kota Sawahlunto yang akan menjadi kota mati karena pada di tahun 2000 deposit batu bara menipis pun, sekarang bisa di atasi dengan pemilihan kebijakan manjadi kota wisata. Dengan konsep kepariwisataan yang ditawarkan Sawahlunto, pada saat ini Sawahlunto pun mulai dikenal oleh masyarat luas.
2. Kebijaksanaan dan kendala; dalam hal ini, kebijaksanaan yang di buat oleh pemerintah Kota Sawahlunto untuk menunjang kegiatan pariwisata antara lain, dengan menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan kota

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pusataka Utama.
- Faulkner, Bill. 1997. *Perkembangan pariwisata di Indonesia: perspektif "gambaran besar" (Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan)* Bandung: ITB.
- Gunawan, Myra P. 1997. *Pariwisata di Indonesia: dulu, kini, dan yang akan datang. (Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan)* Bandung: ITB,
- Hartanto, Frans Mardi. 1997. *Menjelang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan: Perspektif perencanaan kebijaksanaan (Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan)*. Bandung : ITB.
- Kajian Analisis Rente Ekonomi Usaha Penunjang Pariwisata Kota Sawahlunto. Tahun 2009.
- Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Kota Sawahlunto. Tahun 2007.
- Kacolola, Akbar. 2009. *Kamus istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta. Cakrawala.
- Koentjaraningrat, 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia,
- Koswara, Ina Herlina. 1998. *Konsentrasi Spesial dan Sektorial Fasilitas Penunjang Kepariwisataaan (Pariwisata Indonesia Menuju Keputusan Yang Lebih Baik)* Bandung : ITB.
- Kumpulan Laporan, 2001. *"Rencana Kota Wisata Tambang Sawahlunto"*. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.